

BAB IV

PENINGKATAN KEAMANAN DEWAN KEAMANAN PBB di REPUBLIK AFRIKA TENGAH

Resolusi DK PBB merupakan cara penyelesaian konflik dengan mengenali sumber-sumber utama asal muasal konflik dan menemukan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tertentu sesuai keputusan bersama anggota-anggota DK PBB yang berupa teguran, sanksi dan operasi militer (Sugiono & Nazala, 2011). Resolusi nomor 2127 merupakan lanjutan dari resolusi 2121 yang berisi tentang peringatan terhadap kekerasan yang telah melanggar hukum humaniter internasional, menekankan program *disarmament, demobilization and reintegration* (DDR) dan menyatakan kesanggupan untuk mengambil tindakan yang merusak perdamaian, stabilitas dan keamanan termasuk melawan pihak-pihak yang melanggar ketentuan perjanjian.

Dewan Keamanan PBB di sponsori oleh Prancis memutuskan resolusi 2127 untuk meredam kekacauan yang dilakukan oleh rezim Francois Bozize, Kelompok Seleka, dan Kelompok Anti-Balaka. Bekerjasama dengan organisasi internasional lain seperti Uni Afrika dan *Economic Community of Central African States* (ECCAS). Organisasi internasional memiliki kapasitas sebagai wadah yang bertujuan menjalin kerjasama dan untuk mengurangi peningkatan konflik dan sebagai aktor karena negara-negara telah menyerahkan sebagian kedaulatannya (Rittberger & Zangl, 2006). Melalui Resolusi 2127 upaya konkrit *Peacemaking, Peacekeeping* dan *Peacebuilding* dapat membantu meringankan konflik di RAT.

A. Penurunan Konflik Internal di Republik Afrika Tengah

Dewan Keamanan melalui resolusi 2127 tahun 2013 menetapkan untuk membantu melindungi warga sipil, menstabilkan negara dan segera memulihkan otoritas negara atas wilayahnya, serta menciptakan kondisi yang kondusif

untuk kepentingan warga sipil yang tidak bersalah. Mengajak masyarakat internasional untuk menyoroti dan membantu mengembalikan kedaulatan Republik Afrika Tengah. Melalui resolusi 2127 Dewan Keamanan menyambut baik kontribusi Uni Afrika dan ECCAS dalam upaya penegakan demokrasi dan penyelamatan kedaulatan RAT.

Pada tanggal 5 Desember 2013 Dewan Keamanan PBB dengan disponsori atau diusulkan oleh Prancis memutuskan untuk mengeluarkan resolusi 2127 yang berisi:

“Further reiterates that, in accordance with the African Charter on Democracy, Elections and Governance, the Libreville Agreements, the relevant ECCAS decisions and the Transition, the Head of Transition, the Prime Minister, the President of the National Transition Council (NTC), the Ministers and members of the NTC bureau cannot participate in the elections intended to restore the constitutional order”

“Urges the Transitional Authorities to take all appropriate steps for immediate disarmament, cantonment and dismantling of all armed groups, throughout the whole territory of the country, consistent with international standard”

Kedua pernyataan tersebut termasuk dalam *Political Process* yang merupakan fokus DK PBB untuk mengembalikan kedaulatan negara. Kutipan pertama menegaskan perintah dan larangan untuk memulihkan tatanan konstitusional, yang kedua menyinggung masalah tindakan yang harus diambil oleh pemegang otoritas transisi pemerintahan Republik Afrika Tengah. Pemegang otoritas transisi (NTC) tersebut dibawah pengawasan dari Uni Afrika dan UNSC untuk memulihkan struktur pemerintahan. *National Transition Council* (NTC) diketuai oleh Alexandre-Ferdinand Nguandet. Pada saat itu Michael Djotodia merupakan pemimpin negara dan tidak mampu mengendalikan kekacauan yang semakin meningkat.

Didalam resolusi 2127 juga mendesak pemegang otoritas transisi (NTC) untuk bekerjasama menerapkan program

disarmament, demobilization and reintegration (DDR) dan program security sector reform (SSR). Pernyataan yang tertera dalam resolusi 2127 sebagai berikut:

“Urges Transitional Authorities to develop and implement disarmament, demobilization and reintegration (DDR) or disarmament, demobilization, repatriation, reintegration and resettlement (DDRRR) programmes including for former Seleka elements who will not be integrated into the security forces and children associated with armed forces and groups”

“Further urges the Transitional Authorities to develop and to implement a comprehensive and nationally owned Security Sector Reform (SSR) programme, which includes appropriate vetting procedures to reconstitute professional, balanced and representative CAR security forces selected on the basis of the respect for human rights and nationality, and calls upon the Transitional Authorities to cooperate with BINUCA and MISCA for these purposes”

Dalam pernyataan resolusi 2127 diatas merupakan bagian DDR/SSR nomer 11 dan 12. DK PBB mendesak NTC untuk mengimplementasikan program DDR. Dan kelompok Seleka ditegaskan tidak akan diikutsertakan dalam pasukan keamanan. Reformasi Sektor Keamanan (SSR) juga ditekankan kepada pemegang otoritas transisi yang mencakup prosedur perekrutan kembali pasukan keamanan RAT yang profesional, seimbang dan representatif untuk bekerjasama dengan BINUCA dan MISCA untuk mengamankan Republik Afrika Tengah. BINUCA dan MISCA merupakan produk operasi *peacekeeping* dan *peacebuilding*.

BINUCA atau *United Nations Integrated Peacebuilding Office in The Central African Republic* merupakan badan yang dibentuk PBB sebagai upaya *peacebuilding* dalam konflik di Republik Afrika Tengah. BINUCA beroperasi dibawah mandat DK PBB untuk mengupayakan konsolidasi perdamaian, rekonsiliasi nasional dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, serta sebagai promotor dan pelindung hak asasi

manusia. Sebisa mungkin BINUCA berupaya memperkuat dialog politik untuk menerapkan Perjanjian Libreville yang berisi tentang penghentian konflik dan tanggung jawab memulihkan keadaan negara (BINUCA, 2013).

Resolusi 2127 menghasilkan *peacekeeping operation* MISCA untuk menstabilkan Republik Afrika Tengah pasca kudeta terhadap Francois Bozize oleh Michael Djotodia. Misi perdamaian MISCA dipimpin oleh Uni Afrika dan didukung penuh oleh PBB. Penerjunan pasukan MISCA setelah resolusi 2127 ditetapkan yaitu pada tanggal 19 Desember 2013. Kekuatan MISCA terdiri dari 5.097 tentara dan 602 polisi dari 10 negara Afrika, meliputi komponen sipil yang menangani masalah-masalah HAM, pelucutan senjata, hubungan kemanusiaan dan urusan politik. Dewan Keamanan PBB memberikan hak untuk mengamankan segala tindakan yang diperlukan kepada MISCA dan Pasukan Militer Prancis untuk meredakan bentrokan antara Anti-Balaka dan Kelompok Seleka di Bangui. Presiden Prancis Francois Hollande pada pertemuan *Peace and Security in Africa* bersepakat dengan Uni Afrika untuk menambah pasukan militer dari 3500 menjadi 6000 pasukan.

Pada tanggal 9 Desember 2013 Pasukan Prancis dan MISCA berhasil melakukan operasi pelucutan senjata melawan kelompok ex-Seleka dan Anti-Balaka. Bersama *Peacekeeping Operation* MISCA melawan serangan selanjutnya di Bangui pada tanggal 20 Desember, hingga mengerahkan senjata berat seperti tank dan senjata ledak. Bentrokan antara pasukan legal dan pasukan pemberontak bertahan hingga awal tahun 2014. Desakan dan sanksi yang diberlakukan kepada pemberontak juga cukup mengurangi eskalasi konflik di Republik Afrika Tengah. Seperti embargo ekspor senjata dan pengiriman tentara bayaran ke RAT.

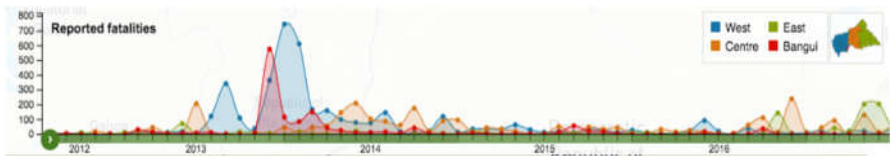
Dewan Keamanan PBB berkoordinasi dengan ECCAS mengadakan *extraordinary summit* di N'Djamena, Chad dimana ketika itu Babcar Gaye selaku Perwakilan Spesial Sekjen PBB untuk RAT memperingatkan bahwa kekerasan

antar kelompok internal di suatu negara dapat membawa situasi bahaya berjangka panjang kepada stabilitas negara dan wilayah yang lebih luas. Artinya, apabila tidak segera dihentikan akan merambat ke negara sekitar RAT. Komite Transisi Nasional RAT sebanyak 135 orang hadir di pertemuan itu bersama Presiden dan Perdana Menteri RAT, Michael Djotodia dan Nicolas Tiangaye. Kedua orang penting ini mengundurkan diri dari posisinya di tanggal 10 Januari 2014.

Setelah pengunduran diri dari jabatan politik, Michael Djotodia digantikan oleh Catherine Samba-Panza. Pada saat penunjukan Presiden baru terdapat delapan kandidat yang akan dipilih langsung oleh NTC. Dibawah pengawasan Uni Afrika dan UNSC Nguandet selaku ketua NTC diamanatkan untuk memilih kandidat yang sama sekali tidak memiliki kedekatan dengan kelompok ex-Seleka dan Anti-Balaka. Samba-Panza juga tidak terikat oleh partai manapun atau disebut sebagai non-partisan.

Dengan dukungan komunitas internasional Samba-Panza yang sempat menjabat sebagai Gubernur Bangui fokus terhadap tiga isu utama. Pertama, memperbaiki sistem pengaturan untuk mengelola pembangunan berkelanjutan khususnya pada sektor SDA. Sebagai kekayaan negara, SDA Republik Afrika Tengah perlu diolah semaksimal mungkin tanpa ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Kedua, pengelola pajak dan royalti negara perlu diawasi dengan ketat guna memastikan aliran dana yang terkumpul dari eksploitasi mineral dapat berguna sebagai katalis pembangunan yang efektif. Ketiga, pengurangan aktivitas penyelundupan oleh pasukan keamanan nasional dan pencegahan konflik berlian dari pemberontak-pemberontak mampu mengurangi tensi konflik didalam negara maupun diluar negara.

Konflik internal di Republik Afrika Tengah tahun 2012-2016 mengalami eskalasi dan de-eskalasi konflik berdasarkan *Internasional Peace Information Service*. Berikut merupakan data intensitas konflik internal di Republik Afrika Tengah:



Gambar 4.1 Data Intensitas Konflik Internal di Republik Afrika Tengah tahun 2012-2016

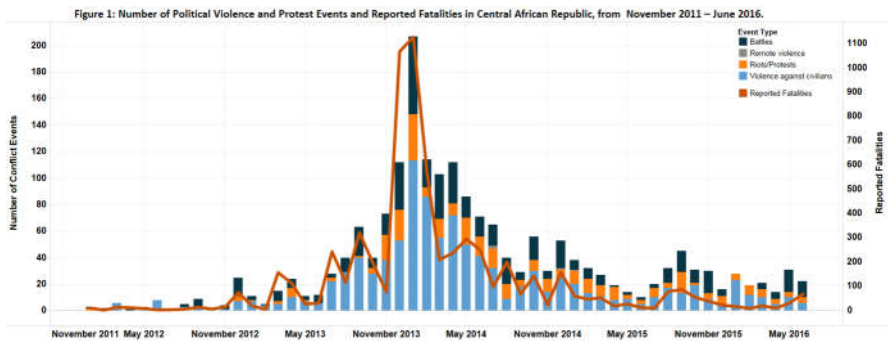
Sumber: <http://www.ipisresearch.be/mapping/webmapping/car/v2/#5.168084284143305/26.35123864911816/5/4/1/2.6s>

Didalam grafik tersebut terdapat empat indikator warna biru (barat), hijau (timur), kuning (tengah) dan merah (ibukota). Eskalasi terbesar terjadi di wilayah barat RAT, dimana di rentang waktu tahun 2013-2014 Anti-Balaka memulai pemberontakan melawan ex-Seleka. Penurunan konflik terjadi ketika Kelompok Seleka dan Anti-Balaka mulai memilih untuk melindungi kelompoknya karena dua alasan yaitu karena merasa telah memiliki daerah kekuasaannya masing-masing dan telah didesak dan dikenakan sanksi seperti embargo ekspor senjata dan pengiriman tentara bayaran oleh Dewan Keamanan PBB. Sebagai Presiden Transisi Samba-Panza melalui programnya juga mampu menurunkan konflik karena tidak memihak kepada salah satu pemberontak.

Dalam grafik tersebut warna biru merupakan daerah kekuasaan Anti-Balaka dan warna hijau merupakan daerah kekuasaan Kelompok ex-Seleka. Sedangkan warna kuning merupakan daerah perbatasan antara Anti-Balaka dan Kelompok Seleka dimana terdapat Ibukota Bangui didalamnya. DDR dan SSR semakin ditekankan oleh Dewan Keamanan

PBB dari tahun ke tahun sampai pada 2016 di Republik Afrika Tengah. Penggunaan senjata api oleh pemberontak semakin minim karena berhasil dilucuti.

Upaya pasukan perdamaian DK PBB mampu menurunkan intensitas konflik sipil dari tahun 2012 sampai 2016. Melalui kerjasama antara pasukan perdamaian DK PBB dan masyarakat internasional, angka kekerasan dan kematian terhadap warga sipil cenderung menurun. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.2 Data Statistik Angka Kematian di Republik Afrika Tengah tahun 2012-2016

Sumber: ACLED-Africa Conflict Trends Report (2016)

Warna biru muda merupakan simbol kekerasan terhadap warga sipil, warna kuning merupakan simbol kekisruhan atau protes, biru tua merupakan pertarungan antar kelompok ex-Seleka, Anti-Balaka, Pasukan Pemerintah dan garis coklat merupakan angka kematian yang tercatat. Angka kematian korban konflik dari tahun 2013-2016 menurun, dari 1100 orang meninggal menjadi sekitar 30 orang yang menjadi korban kekerasan pada setiap peristiwa. Matt-Batten-Carew merupakan seorang ahli atau peneliti konflik di wilayah Timur Tengah, mengatakan bahwa penurunan korban jiwa di Republik Afrika Tengah dikarenakan oleh sebagian besar senjata baik dari militer RAT maupun pemberontak telah dilucuti dan selain

itu embargo senjata semakin diperketat oleh DK PBB dan Masyarakat Internasional yang saling berkoordinasi.

Penyelamatan warga sipil lain di daerah Ibukota Bangui oleh MINUSCA dari distrik PK12. MINUSCA mampu menjaga 1.200 komunitas muslim dari serangan Anti-Balaka pada saat relokasi ke wilayah utara Republik Afrika Tengah. Pasukan Perdamaian ini pada saat relokasi dibantu oleh *International Organisation for Migration* (IOM), *the Protect Cluster* dan *UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) (Zapater, 2014). Dan UNHCR bekerjasama dengan MINUSCA menyediakan peralatan pokok, seperti, terpal, tikar, selimut dan tenda darurat kepada 120.000 warga sipil yang terlantar di delapan provinsi yang berbeda.

B. Kemunculan Demokratisasi di Republik Afrika Tengah

Dewan Keamanan PBB melihat situasi pasca lengsernya Michael Djotodia kemudian memutuskan untuk meningkatkan *peacekeeping operation* di tahun 2014. Sekjen PBB atas keputusan resolusi 2149 membentuk MINUSCA yang merupakan gabungan antara BINUCA dan MISCA menjadi operasi militer yang lebih kuat. Sekitar 10.000 personil militer, termasuk 240 pengamat militer, 200 petugas staff dan 1.800 personil polisi. MINUSCA sebagai *peacekeeping operation* memiliki tiga prinsip dasar yaitu persetujuan dari para pihak (Consent of the parties), Keadilan (Impartiality), Tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri dan membela mandat (Non-use of force except in self-defence and the mandate). MINUSCA menerapkan tiga prinsip tersebut untuk mengawal kemunculan demokratisasi di Republik Afrika Tengah.

Dewan Keamanan PBB menjalankan mandatnya melalui operasi militer MINUSCA mengawal berjalannya penyelenggaraan seminar nasional. Didalam seminar nasional Samba-Panza selaku Presiden Transisi RAT berdialog dengan rakyat dari seluruh penjuru Republik Afrika Tengah. Seminar

ini disebut dengan Bangui Forum yang dilaksanakan pada bulan Mei 2015. Sekitar 800 warga negara RAT bersama elit pemerintah membahas empat topik penting yaitu pembangunan sosial dan ekonomi, tata kelola, keadilan dan rekonsiliasi, serta perdamaian dan keamanan. Musyawarah tersebut menghasilkan Pakta Republik untuk Perdamaian (Republican Pact for Peace). Disela-sela musyawarah pemerintah RAT juga menandatangani perjanjian pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR) dengan sepuluh kelompok pemberontak utama Republik Afrika Tengah.

Melalui dorongan DK PBB dan Masyarakat Internasional Bangui Forum menghasilkan keputusan untuk diadakannya pemilu. *National Elections Authority* (ANE) dibentuk untuk merancang dan menjalankan proses pemilihan umum. Dieudonne Kombo-Yaya sebagai ketua ANE berjuang untuk menyelenggarakan pemilu. Namun, hambatan seperti kekurangan staf dan pendanaan serta ketidakamanan yang ditimbulkan oleh kelompok pemberontak membuat jadwal pemilu mundur. *The African Union Electoral Observation Mission to CAR* mengatakan bahwa dasar kegagalan pemilu pada pertengahan tahun 2015 dikarenakan oleh ketidaksiapan ANE dalam pembentukan dan penerbitan kartu pemilih.

Pada tanggal 13 Desember 2015 diadakan Konstitusional Referendum, MINUSCA sebagai pengawal pemilu ketika itu meminta untuk menunda pemungutan suara. Karena terdapat kekacauan di beberapa distrik seluruh Bangui diperpanjang pada tanggal 14 Desember 2015. Referendum ini dianggap oleh banyak pihak sebagai gladi resik bagi pemilihan Presiden dan Parlemerter.

Keputusan pemilu diadakan pada tanggal 30 Desember, selama pemilu berlangsung kekerasan yang sebelumnya dikhawatirkan sebagian besar tidak terjadi. Pada putaran pertama tidak ada satu kandidat yang memperoleh lebih dari 50% suara. Oleh karena itu pemilihan umum putaran kedua diperlukan, pemilu selanjutnya diadakan pada 14 Februari 2016. Dalam pemilu ini terdapat dua kandidat kuat, Faustin-Archange Touadera

(Independen/non-partisan) dan Anicet-Georges Dologuele (URCA). Pemilu tersebut dimenangkan oleh Faustin Touadera dengan perolehan suara 63%. *Special Report* dari *United State Institute of Peace* mengatakan bahwa pemilu Republik Afrika Tengah tahun 2015-2016 berjalan tanpa kekerasan besar. Dikarenakan komitmen warga negara untuk memilih secara damai, upaya aktor internasional dan masyarakat sipil untuk mengendalikan diri serta menghormati waktu transisional dalam masa-masa pemilu.